

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bakung

Disusun untuk memenuhi Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Metode
Penelitian Administrasi Publik



Oleh :

Rihhadatul Aisy 2216041132

Dosen Pengampu : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

2023

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yaitu pakaian, rumah dan makanan. Saat mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut terkadang manusia secara tidak sadar menghasilkan sampah setelah memakai dan mengkonsumsinya. Sampai sekarang sampah masih menjadi permasalahan utama terutama di kota-kota besar. Pada dasarnya, sampah yang tidak dikelola dengan baik serta kebijakan pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat mempengaruhi lingkungan hidup.

Selain itu dengan adanya penambahan jumlah penduduk, jika pengelolaan sampah tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya tumpukan sampah di berbagai tempat. Kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak adanya buangan/limbah yang meningkat dan bervariasi. Buangan tersebut bisa berupa sampah padat ataupun limbah cair yang merupakan hasil aktivitas baik dari pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya (Notoatmodjo, 2003:166).

Kehadiran sampah saat ini dan masa mendatang diprediksikan akan terus bertambah seiring dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudradjat (2008:6) menyatakan bahwa permasalahan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan terutama di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, dan Medan.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton timbulan sampah sepanjang 2022. Pada 2022 Jawa Tengah menjadi penghasil sampah terbesar, yakni mencapai 4,25 juta ton atau 21,85% dari total timbulan sampah nasional. DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyusul dengan total timbulan sampah masing-masing 3,11 juta ton, 1,63 juta ton dan 1,11 juta ton. Adapun menurut KLHK, sebanyak 9,06 juta ton timbulan sampah nasional berhasil ditangani sepanjang 2022. Kemudian 5,05 juta ton timbulan sampah berhasil dikurangi pada tahun 2021 lalu.

Kemampuan pemerintah dalam menangani sampah pada provinsi-provinsi berkategori besar di Indonesia masih terbatas dan belum maksimal. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya pencemaran air dan tanah serta meningkatkan potensi banjir. Oleh karena itu masalah persampahan perlu ditangani secara serius dengan teknis operasional dan manajemen yang tepat serta terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing (Darmanto, 2012:175).

Masalah umum yang dihadapi oleh perkotaan di Indonesia, termasuk perkotaan di Lampung, adalah pembuangan sampah padat dan ketersediaan tempat pembuangan akhir. Pada berita media cetak dan media online menyebutkan bahwa minimnya fasilitas penampung sampah di Bandar Lampung, membuat banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan . Selain itu, beberapa sungai di Bandar Lampung seperti Way Kedaton, Way Penengahan, Wai Awi, dan Way Gintung dihiasi berbagai jenis sampah, khususnya sampah rumah tangga, menumpuk di tepian sungai yang mengering di tengah musim kemarau.

Volume sampah domestik di Kota Bandar Lampung setiap harinya di tahun 2022 meningkat dibanding pada tahun 2021 lalu. Volume sampah per hari di Bandar Lampung tahun 2022 sudah 1.000 ton per hari meningkat dari tahun 2021 yang hanya 850 ton per hari. Berdasarkan pada data tersebut, berarti volume sampah di Kota Bandar Lampung bertambah kira-kira 100 ton per hari. Jika tidak ada tindakan nyata pada level masing-masing pihak, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk peduli sampah, maka persoalan sampah akan menjadi bencana bagi kota ini.

Pada kasus yang lain, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA yang ada di kota Bandar Lampung dan hanya satu – satunya di kota tapis berseri terletak di kelurahan Bakung kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung dengan luas tanah 14 Ha, dan sudah beroperasi sejak tahun 1994 oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Tempat pembuangan akhir sampah adalah tempat dimana sampah dikelola untuk dimusnahkan baik dengan cara penimbunan dengan tanah secara berkala (sanitary landfill), pembakaran tertutup (insenerasi), pemadatan dan lain lain. Proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan dari sampah padat (solid waste) dan sampah yang dihasilkan dari dalam kota atau dari daerah nonkota, telah menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan oleh mereka yang terlibat dalam manajemen pengelolaan sampah. Manajemen pengelolaan persampahan harus memberikan alternatif solusi yang terbaik seperti

metode manajemen sampah padat yang berkelanjutan (sustainable solid waste management) yakni suatu solusi yang lebih efisien, secara teknik tepat, dan secara sosial dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 183,77 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.209.940 jiwa (berdasarkan data tahun 2023). Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Semakin berkembangnya kota Bandar Lampung maka makin meningkat pula jumlah sampah yang terangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. sekitar 800 ton/hari dengan menggunakan 15 armada truk, dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung dengan menggunakan teknologi open dumping sejak tahun 1998, sedangkan sebelumnya menggunakan sistem sanitary landfill.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut menjelaskan tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 18 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Target pengurangan sampah;
- b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA;
- c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah; dan
- e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung secara teknis saat ini dilakukan oleh 4 (empat) instansi yaitu:

- (1) Untuk Dinas Lingkungan Hidup menangani sampah di jalan protokol, sapuan jalan, pertokoan, restoran, hotel, industri, perkantoran dan fasilitas umum;
- (2) Untuk sampah di terminal bis antar kota dan dalam kota serta stasiun kereta api dikelola oleh Dinas Perhubungan;
- (3) Sampah di 10 pasar tradisional dikelola oleh PD Pasar;
- (4) Sampah di pemukiman di kelola oleh kecamatan melalui Sokli.

Dalam hal ini Penanganan permasalahan sampah tidak dapat hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat luas menjadi persyaratannya. Pemerintah merupakan penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan perumusan kebijakan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki penguasaan atas informasi berkenaan dengan sumber produksi sampah, proses pengelolaan dan bagaimana hasil pengelolaan dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan daerah.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarluasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetika), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya (Aswar, 1986). Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam, praktek pengelolaan sampah di setiap sector, antara Negara maju dan Negara Selain itu kurang optimalnya pengelolaan sampah akibat kurang koordinasi antar instansi yang menangani permasalahan sampah juga menjadi salah satu penyebabnya. Hal tersebut penting diketahui agar dapat mencari solusi yang tepat guna menurunkan jumlah produksi sampah dan mendapat gambaran tentang pola pengelolaan sampah yang tepat. Dalam kaitan itulah keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan menjadi sangat penting sehingga proses dari implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

partisipasi masyarakat menjadi bagian penting yang tak dapat terpisahkan dengan peranan pemerintah karena merekalah sumber penghasil sampah. Salah satu bagian penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah adalah partisipasi aktif dari masyarakat serta didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendukung kegiatan tata kelola persampahan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung juga belum dapat berjalan secara maksimal. Sejak pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan hingga beralih ke Dinas Lingkungan Hidup saat ini, khususnya dalam mengatasi volume sampah yang ada di wilayah kota Bandar Lampung yang tiap harinya meningkat hingga mencapai ± 10.000 ton pertahun. Secara faktual, pilihan untuk menjadikan peran pemerintah penting dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sampah sebagai fokus dalam penelitian ini adalah bahwa hampir tidak ada penanganan lebih lanjut dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ditujukan untuk lebih menjelaskan masalah-masalah yang akan diteliti hingga dapat menentukan penyelesaian masalah yang tepat serta mencapai tujuan penelitian. Berdasar latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung?
2. Faktor- faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian tersebut dapat memberikan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung.
2. Untuk mengevaluasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah serta memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan di dalam menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber rujukan bagi Pemerintah Daerah mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sehingga pemerintah dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut.
- b. Membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji, memahami serta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung.
- c. Memperluas pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yusrival, 2022	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.	Perilaku hubungan organisasi di TPS Bukit Asri telah terlaksana dengan melihat komitmen dan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba. Sehingga indikator pertama yaitu Perilaku hubungan antar organisasi telah dijalankan oleh pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bukit Asri dalam merencanakan, membangun, mengelola, serta menjalankan TPS Bukit Asri ini agar dapat mengurangi volume sampah sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
2.	Arief Rakhman Hakim, 2021	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021	Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Pengolahan Sampah perlu melibatkan stekholder terkait, karena dalam menyadarkan masyarakat terkait penanganan sampah membutuhkan metode yang pas , sehingga mampu di tangani dengan serius Teknologi ini digunakan untuk mengurangi kuantitas dan kompleksitas sampah

			secara regional. Rantai transportasi yang panjang dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang signifikan akan terpotong dengan model ini (APBD). Selanjutnya, masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam pengelolaan, sehingga menghasilkan proses dan hasil yang secara signifikan lebih unggul dari cara saat ini.
3.	Teguh Imam Fitroni, 2018	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan.	Faktor pendukung yang peneliti temui di lapangan ada dua, yakni adanya komitmen yang baik dari pelaksana kebijakan untuk menangani permasalahan sampah dan adanya jejaring kerjasama antara pelaksana kebijakan dalam Program LGC. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah minimnya fasilitas publik untuk penanganan sampah. Fasilitas tersebut terdiri dari ketersediaan TPA dan Tempat Sampah yang sudah terpilah jenis sampahnya. Kemudian adalah tidak adanya keterlibatan yang masif dari aktifis lingkungan dan LSM.

2.2 Tinjauan Umum

2.2.1. Tinjauan Umum Analisis

2.2.1.1 Pengertian Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Menurut Nana Sudjana (2016:27) menyatakan “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya”.

2.2.2 Tinjauan Umum Implementasi

2.2.2.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Menurut Sopiarno (2015:8) istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, (2008:65) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter yang dikutip oleh Wahab dalam (Mokodompis et al., 2019) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai berikut: Suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottomup, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan. Proses administratif yang dilakukan oleh unit-unit administratif pada setiap level pemerintahan disejalankan dengan tipe-tipe kebijakan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe kebijakan tersebut dapat bersifat : distributive, regulatory, selfregulatory, redistributive (Anderson, 1978 : 127; Ripley, 1987 : 71).

Menurut Soren C. Winter ada 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan yakni :

- 1). Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Dimensidimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara. Salah satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam suatu organisasi. Tetapi, agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagianbagian organisasi itu.

Tingkat implementasi dapat ditempuh pada organisasi formal, sementara administrasi pemerintahan dapat diterapkan melalui hasil kebijakan.

2). Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah.

Dimensinya adalah kontrol organisasi, etos kerja dan norma-norma profesional. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku implementor tingkat bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi). Sehingga menurut Lipsky;1980, dalam Parawangi (2011) bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya “menyimpang” dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, perilaku implementor tingkat bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan publik, dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya (Parawangi,2011).

3). Perilaku Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat. Variabel perilaku target grup dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif (Winter:2003). Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipasi yakni mendukung atau menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi.

2.2.3 Tinjauan Umum Kebijakan

2.2.3.1 Pengertian Kebijakan

Secara bahasa atau etimologi, kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:49), diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan.

Adapun Menurut Lasswell (dalam Sopianito,2015:18), kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur.

Carl J Federick (dalam Agustino,2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan dan keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

2.2.3.2 Tahapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik untuk membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini memudahkan dalam mengkaji kebijakan. Menurut Dunn (dalam Winarno, 2012:36), tahap-tahap kebijakan adalah:

- **Penyusunan Agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

- **Formulasi Kebijakan**

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives atau policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

- **Adopsi Kebijakan**

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

- **Implementasi Kebijakan**

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badanbadan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi pemerintahan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

- **Evaluasi Kebijakan**

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

2.2.4 Tinjauan Umum Sampah

2.2.4.1 Pengertian Sampah

Berikut berbagai definisi dan batasan mengenai sampah yang banyak tertulis dalam buku yang bersumber dari beberapa organisasi dan ahli persampahan serta lingkungan, antara lain (Trisna, 2014:4) :

- Menurut WHO expert commite, Jhon Pickford- Solid wastes are useless, unwanted or discarded material arises from man's activities and not free- following.
- Menurut George Tehobanoglous, solid wastes are all that are normally solid and and that are discarded as useless and unwanted.
- Menurut Tandjung, sampah adalah sesuatu yang tak berguna lagi, di buang oleh pemiliknya atau pemakai semula.
- Mandelan, sampah adalah limbah padat yang di buat dari aktivitas Manusia.
- Menurut istilah untuk manajemen, Ecolink, sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
- Menurut Radyastuti, sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

- Berdasarkan SK SNI 19-2454, sampah adalah limbah padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang sudah dianggap tidak berguna lagi dan terus di kelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
- Menurut Anwar, sampah adalah segala sesuatu yang tidak berguna, tidak bernilai dan tidak diinginkan lagi pada saat dimana pemiliknya membuangnya yang dapat berasal dari hasil aktivitas baik manusia maupun makhluk hidup lainnya namun dapat bernilai pada saat pihak kedua memanfaatkannya.
- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana sampah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya yang berbentuk padat yang tidak diinginkan lagi dan dianggap tidak berguna pada waktu tertentu.

2.2.4.2 Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan Pembatasan timbulan sampah, Pendaaur ulangan sampah, dan Pemanfaatan kembali sampah. Sedang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- Pemilahan, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah.
- Pengumpulan, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara / tempat pengolahan sampah terpadu.
- Pengangkutan, yaitu membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah.

Sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, dan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan yang sebelumnya menuju ke media lingkungan secara aman.

Untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini, pengelolaan sampah yang sering digunakan dalam masyarakat adalah 3R (reduce, reuse, recycle) yang berarti pengurangan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan. Dalam Vesilind (2012) menjelaskan mengenai metode pengelolaan sampah sebagai berikut :

1). Reduction (pengurangan)

Pengurangan sampah dapat dicapai dengan cara :

- Mengurangi jumlah bahan yang digunakan dari tiap produk tanpa mengorbankan fungsi produk
- Meningkatkan masa hidup suatu produk
- Mengurangi / menghilangkan kebutuhan penggunaan suatu produk

2). Reuse (penggunaan kembali)

Yaitu menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya (penggunaan barang bekas).

3). Recycling (pendaurulangan)

Proses pendaurulangan membutuhkan pemisahan dari materi yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Materi sampah yang dapat didaurulang berupa sampah padat seperti kertas, logam, plastik, kaca, dan sampah dari lahan.

4). Recovery (pemulihan)

Proses ini rata-rata digunakan untuk sampah yang terbuat tidak dari 1 material. Sebagai contoh : kaleng minuman, terbuat dari baja (steel), seng, dan kertas pembungkus pada bagian luar. Proses recovery ini melalui

suatu mesin yang dapat memulihkan bagian tertentu dari produk sehingga dapat digunakan kembali.

5). Disposal of Solid Waste in Landfills (pembuangan sampah padat di lahan)

Sampah padat disini menjadi bagian dari bahan urugan tanah.

6). Energy Conversion (pengubahan energi)

Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh energi dengan penguraian dan pembentukan bahan bakar melalui pembakaran sampah sehingga didapat tekanan / panas.

2.3 Kerangka Pikir

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman pengelolaan sampah di Indonesia, ditekankan bahwa sampah telah menimbulkan permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Disadari bahwa sampah sebagai buangan dari aktifitas domestik, komersil maupun industri tidak dapat dihindari. Kecenderungannya bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, pertumbuhan jumlah penduduk maupun dinamika kehidupan masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam upaya mengurangi sampah dari tingkat sumber sampah sampai pengelolaan sampah itu sendiri.

Secara normatif, banyaknya sampah yang dihasilkan harus diolah dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan efek negatif seperti mencemari lingkungan yang mana dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan banjir, serta penyumbatan sistem drainase dan sebagainya. Namun ternyata, kesadaran untuk mengolah sampah dengan baik di dalam masyarakat masih minim. Hal ini dapat dilihat dari anggapan masyarakat mengenai sampah itu sendiri yang dianggap sebagai limbah yang tak memberikan manfaat maupun anggapan bahwa urusan sampah adalah urusan pemerintah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut mengatur mengenai

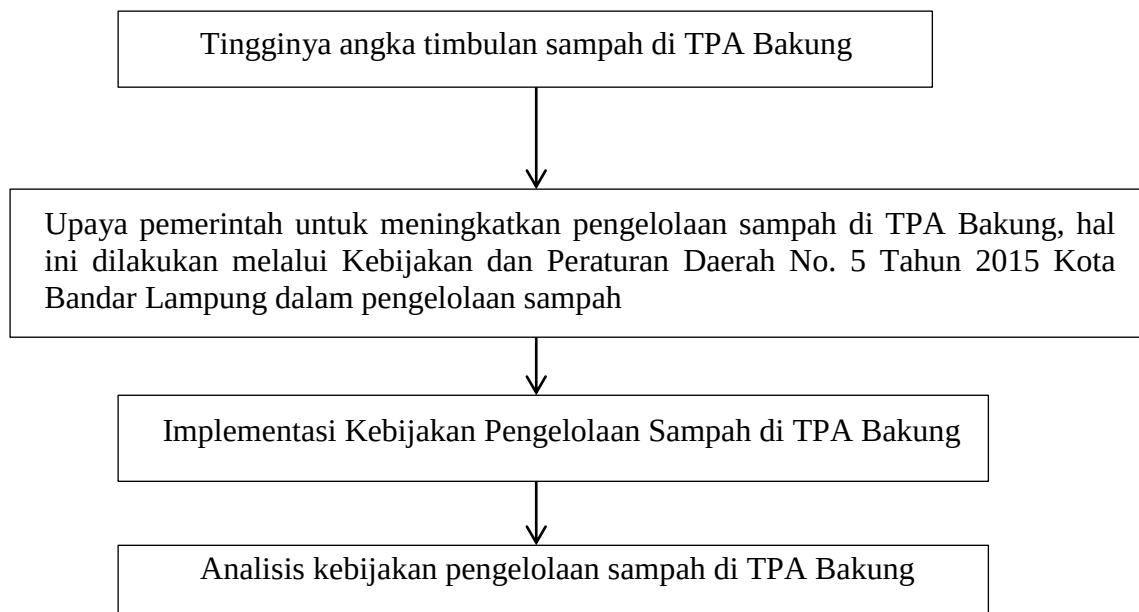
penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 18 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah yang berisi:

- a) Target pengurangan sampah
- b) Target penyediaan sarana-prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA
- c) Pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat
- d) Target kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah, dan
- e) Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Pada aspek isi kebijakan, variabel yang akan dianalisis adalah:

- (1) Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- (2) Derajat perubahan yang diinginkan,
- (3) Kedudukan pembuat kebijakan,
- (4) Siapa pelaksana program, dan
- (5) Sumber daya yang digunakan. Sementara dalam konteks implementasinya, faktor yang akan dianalisis adalah:
 - (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat,
 - (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, serta
 - (3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Secara lebih rinci, kerangka pikir tersebut tergambar dalam bagan berikut :



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2013:6), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Moleong (2013:6) menambahkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif secara substansi melihat sesuatu proses atas fenomena dan bukan menilai hubungan atau pengaruh antar fenomena.

Menurut Sugiyono (2009:9), metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan Sukmadinata (dalam Sugiyono, 2009:9), menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan memberi gambaran melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Maka peneliti mengambil tipe penelitian Kualitatif dengan mendeskripsikan Evaluasi Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui

fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga antara rumusan masalah, tujuan penelitian dan fokus penelitian ini saling berkaitan.

Menurut Moleong (2013:94) penetapan fokus adalah sesuatu hal yang penting dalam penelitian, artinya dengan penetapan fokus dapat membatasi studi agar penelitian tidak melebar. Dengan fokus penelitian dapat diketahui persis data mana dan data tentang apa dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Oleh karena itu dengan penetapan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu ataupun data yang akan dibuang.

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan sisi tujuan, akan memperoleh gambaran tentang bagaimana proses implementasinya sehingga akan diketahui faktor yang menjadi pendorong atau penghambat dalam implementasinya. Untuk mengeksplorasinya, peneliti menggunakan model Merilee S. Grindle yang menekankan keberhasilan implementasi pada dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation), yaitu meliputi :

1. Isi Kebijakan :

- a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- b) Derajat perubahan yang diinginkan,
- c) Kedudukan pembuat kebijakan,
- d) Siapa pelaksana program,
- e) Sumber daya yang digunakan

2. Konteks implementasi:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat,
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa,
- c) Kepatuhan dan daya tanggap

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi ditentukan dengan sengaja. Dalam penentuan lokasi penelitian ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dengan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Mempertimbangkan hal di atas, maka penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung. Pertimbangannya, volume sampah di Kota Bandar Lampung mencapai 800-850 ton per hari meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 700-750 ton per hari. Data tersebut menunjukkan bahwa trend peningkatan jumlah sampah di Kota Bandar Lampung selalu meningkat setiap tahun. Meskipun telah terdapat Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah seperti halnya aturan tersebut tidak terlalu signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat maupun berkurangnya volume sampah.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yakni:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu mengenai kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi 48 masyarakat di Kota Bandar Lampung dengan cara observasi dan wawancara kepada informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dinas-dinas terkait dengan pengelolaan sampah maupun masyarakat Kota Bandar Lampung dalam bentuk jadi, baik yang dipublikasikan atau tidak, yang telah dikumpulkan oleh penulis dan berhubungan dengan masalah yang telah dibahas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Fathoni (2011:104) mendapatkan data yang relevan untuk melakukan analisis pembahasan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek penelitian, yang bersumber dari buku maupun literatur.
2. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek yang diteliti.

Adapun cara-cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini, yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah terjadi sebelumnya, dan ada hubungannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan obyek penelitian dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pada penelitian ini penulis akan memaparkan teknik analisis data yang sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Moleong (2013:37), reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Menurut Moleong (2013:37), penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Moleong (2013:37), langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan teknik triangulasi. Makna triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau data pembanding terhadap data itu (Wiersma, dalam Sugiyono, 2007:372). Berdasarkan klasifikasi adanya lima macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode, maka yang dipergunakan untuk proses validasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi sumber dipergunakan dengan cara membandingkan informasi yang didapatkan dengan sumber yang berbeda. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara oleh peneliti dan dibandingkan dengan fakta hasil observasi atau dengan dokumen yang ada.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sampah di pemukiman di kelola oleh kecamatan melalui Sokli Pengelolaan sampah pasar. Pengelolaan sampah di lingkungan pasar dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Secara kelembagaan, sebagaimana Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 19 Tahun 2008, Kepala UPT Pasar berada di bawah Dinas Pengelolaan Pasar dan secara hirarki bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. Secara nyata dinyatakan Dinas Pengelolaan Pasar bertanggungjawab terhadap pengumpulan sampah yang berasal dari seluruh pasar dan diangkut ke TPA Bakung. 53 Pemerintah Kota Bandar Lampung dituntut untuk dapat mengelola sampah dengan baik, melalui satuan kerja perangkat daerah yang secara khusus menangani masalah ini yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan, pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan pemakaman umum berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas perbantuan.

Rencana pengelolaan sampah di TPA Bakung yang berisi tentang rencana tindak termasuk sasaran pencapaian disusun dengan menggunakan 3 (tiga) skenario alternatif, yaitu :

1. Skenario I:

Pengelolaan Sampah Tanpa Perlakuan Pengelolaan sampah tanpa perlakuan adalah pengelolaan sampah secara konvensional atau mengikuti trend pola pengelolaan sampah selama ini di Bandar Lampung; Artinya tidak ada inovasi untuk melakukan pengelolaan sampah secara terpadu. Sampah yang dihasilkan dari sumber sampah langsung dikumpulkan, diangkut kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pada skenario ini, peningkatan pelayanan sampah hanya dititikberatkan pada kebutuhan sarana dan prasarana sampah (peralatan, alat transportasi, personil dan tempat).

2. Skenario II:

Pengelolaan Sampah dengan Perlakuan Pola 3R+P Pola 3R+P adalah program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) mengadopsi program pemerintah yang sekarang sedang dilaksanakan ditambah dengan penekanan pada partisipasi (P) masyarakat. Program 3R tanpa partisipasi masyarakat tidak akan efektif karena program 3R tidak berlanjut bila pendanaan atau dukungan dari pemerintah berhenti. Untuk menjaga keberlanjutan program pengelolaan sampah dengan menggunakan 3R+P, maka prioritas utama dalam skenario adalah pentingnya membangun partisipasi dari masyarakat terutama perlakuan terhadap sampah di sumber

timbulan dengan pemilahan dan pemanfaatan. Oleh karna itu, kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan tidak akan sebesar pada skenario I.

3. Skenario III:

Pengelolaan Sampah dengan Perlakuan 3R+P+Incenerasi Pola 3R+P+Incenerasi adalah program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang menekankan partisipasi masyarakat sebagaimana skenario II ditambah dengan upaya melakukan pemusnahan baik di TPS dalam skala kecil maupun di TPA dalam skala besar. Prioritas dalam skenario ini selain pentingnya partisipasi masyarakat dalam segala aspek juga perlunya penyediaan alat pemusnah sampah (incenerator) baik skala kecil di tingkat TPS dan TPST maupun incenerasi skala besar di TPA Bakung.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan cukup baik, terbukti dari pengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjalankan penyuluhan dan pensosialisasian di berbagai tempat seperti di sekolah-sekolah, kelurahan, kecamatan hingga menempatkan kotak sampah di berbagai lokasi yang berada di Kota Bandar Lampung. Namun sayangnya, masih terjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini, diantaranya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah di berbagai tempat yang tidak seharusnya. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil faktor pendukung dan penghambatnya yang telah disajikan oleh penulis:

1. Pada indikator isi kebijakan :

a. Derajat perubahan yang diinginkan Perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah pada kondisi lingkungan yang menjadi lebih bersih dan sehat. Oleh karena itu, hal tersebut dapat mengurangi resiko banjir serta polusi lebih berkurang juga membantu proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki target untuk mendapatkan penghargaan adipura seperti yang belum sempat didapatkan sebelumnya.

b. Kedudukan pembuat kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kedudukan tertinggi dalam implementasi kebijakan, melalui Instansi Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi ketegasan sikap pemerintah ini masih banyak menemui kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan gagalnya implementasi dari sebuah kebijakan tersebut. sehingga pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan sampah dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar.

c. Siapa pelaksana program Pelaksana dari program kebijakan pengelolaan sampah ini adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang kekuasaanya di berikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

d. Sumber daya yang digunakan Sumber daya yang digunakan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang mengutamakan kepedulian pada lingkungan dan kebersihan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan PT. Unilever dengan menempatkan beberapa kotak sampah di titik tertentu, seperti di Taman Gajah, PKOR, juga Stadion Pahoman melalui berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle).

e. Jenis manfaat yang akan dihasilkan Jenis dan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pengelolaan sampah adalah agar tercipta pengelolaan sampah yang baik juga menumbuhkan

kesadaran masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. Manfaat dari mengelola sampah diantaranya adalah menghemat energi, karena dari sampah sendiri bisa diciptakan berbagai jenis bahan bakar yang dihasilkan oleh pupuk kompos. Dan yang kedua, bisa mengurangi polusi. Ketiga memperindah lingkungan sekitar tempat tinggal. Keempat mengurangi dampak penyebab masalah banjir disekitaran bantaran sungai dan siring.

2. Pada indikator Konteks implementasi:

- a. Pemerintah Kota Bandar Lampung melimpahkan kekuasaannya kepada Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tanggung jawab di kota Bandar Lampung. Seperti di wilayah bantaran sungai, jalan trotoar, pemukiman, daerah pasar tradisional, dan daerah terminal
- b. Kebijakan pengelolaan sampah akan mudah dilaksanakan bila tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Bandar Lampung.
- c. Kepatuhan masyarakat akan kebijakan pengelolaan sampah ini masih kurang. Masih banyak masyarakat yang melanggar aturan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis, diantaranya :

1. Kebijakan pengelolaan sampah diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah di TPA Bakung.
2. Memperbanyak lagi tempat pembuangan sampah di bagian di ruang-ruang terbuka, seperti di trotoar maupun di tempat terbuka lainnya seperti taman dan pasar.
3. Memperbanyak sokli. Agar sokli tidak kewalahan mengambil sampah sampah di masyarakat dan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.
4. Mewajibkan pemerintah memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar peraturan dan membuang sampah bukan pada tempatnya berupa hukuman denda dan sebagainya.
5. Membutuhkan keseriusan dari pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan harus di dukung oleh semua pihak tidak terkecuali masyarakat itu sendiri. Walaupun sebaik apa program penanganan sampah, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran dari masingmasing yang menciptakan sampah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Qodriyatun, S. N. (2014). *Sampah: Permasalahan Dan Pengelolaannya*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Riduan, A. (2021). *Penanganan Dan Pengelolaan sampah: (Studi Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*. Bintang Pustaka Madani.
- Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 97 Tahun 2017 Tentang kebijakan Dan Strategi Nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga*. (2017). . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia.
- Qodriyatun, S. N. (2019). *Sampah Plastik Dan Implikasi kebijakan Pembatasan Plastik sekali pakai terhadap Industri Dan Masyarakat*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR.
- Peraturan gubernur Jawa Barat nomor 91 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi daerah provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga tahun 2018-2025*. (2019). . Biro Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Purnomo, C. W. (2020). *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Gadjah Mada University Press.
- Matondang, M. M. (2018). *Pengelolaan Sampah di Kota Medan, Sumatera Utara: Tinjauan Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*. Dinas Perpustakaan dan Arsip, Provinsi Sumatera Utara.
- Suyasa, W. B., & Mahendra, M. S. (2016). *Evaluasi Dan perencanaan Pengelolaan sampah perkotaan*. Udayana University Press.
- Riduan, A. (2021). *Penanganan Dan Pengelolaan sampah: (Studi Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*. Bintang Pustaka Madani.
- Hadisiswati, I., & Ferricha, D. (2017). *Penerapan Prinsip green constitution Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam Pengelolaan Sampah di Kab. Tulungagung*. IAIN Tulungagung Press.

Jurnal :

- Phelia, A., & Damanhuri, E. (2019). Kajian evaluasi TPA Dan Analisis Biaya Manfaat Sistem Pengelolaan Sampah di TPA (Studi Kasus TPA Bakung Kota Bandar Lampung). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 25(2), 85–100. <https://doi.org/10.5614/j.tl.2019.25.2.6>
- Hardiyanti, K. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(3). <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.10506>
- Sujatmiko, C., Juwita, F., & Wisnaningsih, W. (2022). Pengelolaan sampah rumah tangga bagi warga di kelurahan Bakung Kota Bandar Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 3(02), 104–113. <https://doi.org/10.24967/jams.v3i02.1954>
- Iryani, D. A. (2019). Karakterisasi Dan estimasi emisi gas rumah Kaca Dari Sampah Padat Kota Di TPA Bakung Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 9(2), 218–228. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.218-228>
- Yacadewa, A., & Musa'ad, M. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Distrik Sentani kabupaten jayapura. *JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK*, 4(3), 124–142. <https://doi.org/10.31957/jkp.v4i3.2417>
- Wati, F. R., Rizqi, A., M. Iqbal, M. I., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis tempat pengelolaan sampah terpadu 3r di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 10(1), 195–203. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296>
- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Sukabumi. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>
- Novaldi, M. F., Budiati, A., & Arenawati. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 437–457. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5908>
- Annisa, B. (2019). Asesmen Aliran kritis Sistem Pengelolaan sampah Perkotaan di TPA Sampah. *SPECTA Journal of Technology*, 1(2), 41–53. <https://doi.org/10.35718/specta.v1i2.80>
- Isril, Febrina, R., & Harirah, Z. (2019). Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di kota pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(1), 60. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i1.7059>